

**DIPLOMASI TIMOR LESTE BERGABUNG DALAM  
KEANGGOTAAN TETAP ASEAN**

**Oleh :**

**Syifa Ayunda Swastia<sup>1</sup>**

**([ayunda9.sa@gmail.com](mailto:ayunda9.sa@gmail.com))**

**Pembimbing : Faisyal Rani S.IP, MA**

**Bibliografi : 4 Jurnal, 7 Buku, 10 Website**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research explain about Timor Leste Wants to Join ASEAN Membership, This is an opportunity to improve the country 's profile in the region in addition to economic and political advantages which can be obtained by becoming a member of ASEAN. since Timor Leste applied to join the members of asean untill recently Timor leste has not been accepted as an ASEAN memberhip. One of ASEAN membersipa assume Timor Leste can't be a membership of ASEAN because the gap with the other Asean member countries it feared would be problem fo ASEAN.*

*This research theoretically has built by using Morghenthau Neoclassical Realism perspective on International Relationsand supported by Foreign Policy theory from James N. Rossenau. Formulation of all arguments, data, facts, and theoritical framework in this research using qualitative explanation methods.This research also using nation-state as the level of analyze, the focus on this research Timor Leste in diplomatic efforts became a membership of asean.*

*To accepts Timor Leste doing diplomacy to of ASEAN membership. Timor Leste interlacing good relationship with membership of ASEAN. Timor Leste doing collaboration with ASEAN's membership, then Timor Leste join all ASEAN activity and Timor Leste Also intituiting ASEAN office in Dili, Timor Leste. that aptly been accepted Timor Leste must more tries to get support to joining to be a membership of ASEAN.*

***Keywords: ASEAN, Timor Leste, Timor Leste Diplomacy's, Timor Leste wants to join membership of ASEAN's.***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2012

## I. Pendahuluan

Tulisan ini menjelaskan tentang upaya dan Diplomasi Timor Leste bergabung dalam keanggotaan tetap ASEAN. Karena menurut letak geografisnya Timor Leste Termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa Timor Leste ingin bergabung dalam keanggotaan tetap ASEAN. Sebelum ASEAN atau *Association of South East Asia Nations* terbentuk pada tahun 1967, Negara – Negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerja sama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Assosiation of Southeast Asia* (ASA), Malaya, Philipina, Indonesia (MALPHILINDO), *South East Asia Ministers of Education Organization* (SEAMEO), *South East Asia Treaty Organization* (SEATO) dan *Asia and Pasific Council* (ASPAC). Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integritas kawasan.

Maka dari itu untuk mengatasi perseteruan yang terjadi antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama yang lebih kokoh, maka lima menteri luar negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan agustus 1967 yang merencanakan *Joint Declaration*, yang pada intinya mengatur tentang kerjasama regional dikawasan tersebut.

Pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan diprakarsai lima negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. ASEAN dibentuk dengan berdasar pada keinginan bersama yakni untuk mempercepat pertumbuhan kawasan dalam segala aspek termasuk di dalamnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, ASEAN juga dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas

kawasan. Dengan adanya ASEAN diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi dan ASEAN juga diharapkan akan dapat meningkatkan kerjasama diantara negara-negara anggota.

Pada 1984 Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN yang ke-6, menyusul kemudian Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan terakhir Kambodja pada 1999.<sup>2</sup> Perkembangan terakhir, pada 2011, Timor Leste mengajukan permohonan untuk dimasukkan sebagai anggota ASEAN ke-11, namun belum mendapat respon dari ASEAN.

Keinginan pemerintah Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN didasarkan pada kebijakan luar negeri pemerintahan tersebut serta karena letak geografis yang berdekatan dengan negara – negara ASEAN. Hal tersebut didasarkan pula dengan prinsip – prinsip diplomasi Timor Leste yaitu aktif menjalin kerjasama dengan ASEAN dan menjadi anggota ASEAN. Jalinan kerjasama dan hubungan luar negeri ini dipertegas dalam Undang – undang Dasar Republik Demokratis Timor Leste dalam pasal 8 ayat 2 dan 4 yang menyatakan jelas posisi kebijakan luar negeri Timor Leste yakni dalam pasal 2 yang berbunyi “*Republik Demokratis Timor Leste akan membangun hubungan persahabatan dan kerjasama dengan semua bangsa lain, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, pelucutan senjata yang umum, serentak dan teratur, penciptaan suatu sistem pengamanan bersama serta penciptaan suatu orde ekonomi internasional yang baru, yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan dalam hubungan antar bangsa*”. Sedangkan dalam pasal 4 berbunyi “*Republik Demokratis Timor Leste akan*

---

2

Hhttp://www.aseansec.org/about\_ASEAN.html. di akses pada tanggal 28 Oktober 2015

menjalin ikatan persahabatan dan kerjasama khusus dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara sekawasan". Sampai dengan saat ini, Timor Leste masih berstatus *observer* dalam ASEAN.<sup>3</sup>

Menjadi bagian dari ASEAN tentu bukan persoalan yang mudah khususnya bagi negara seperti Timor Leste yang masih tergolong sangat muda. Meskipun Timor Leste telah mendapatkan dukungan dari beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, Kamboja, dan Thailand, akan tetapi masih banyak pertimbangan dari ASEAN untuk memastikan negara tersebut dapat menjadi anggota resmi ASEAN.

Sekretariat Jenderal ASEAN Luong Minh mengatakan bahwa Timor Leste masih harus dikaji apakah ia memenuhi syarat untuk menjadi anggota ASEAN dengan melihat pada kriteria tertentu seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dinamika politik keamanan di Timor Leste juga masih tergolong muda dan rapuh dalam lembaga – lembaga pemerintahan serta masih sangat rentan terlibat konflik. Berkaca pada hal tersebut, dikhawatirkan akan berpotensi menghambat upaya dan target perwujudan ASEAN *Community* 2015 khususnya pada pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Komunitas itu sendiri bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dalam hal perwujudan perdamaian negara – negara di kawasan dalam lingkungan yang demokratis, adil dan harmonis.

Hambatan – hambatan yang masih sulit dipenuhi oleh Timor Leste terkait dengan keinginannya untuk menjadi anggota ASEAN ialah ketidak mampuan negara tersebut untuk memenuhi kewajiban sebagai

anggota ASEAN. Salah satunya ialah tidak memiliki sumber daya manusia dan finansial untuk menghadiri setiap pertemuan ASEAN yang diperkirakan sebanyak 620 pertemuan setiap tahunnya pada tingkat hubungan luar negeri, agrikultur, dan pertukaran budaya. Dengan banyaknya kewajiban pertemuan tersebut, tentu akan membutuhkan pengeluaran keuangan yang besar bagi negara yang masih berjuang untuk menata dan menetapkan infrastruktur dasar di negaranya. Tidak hanya itu, Timor Leste juga masih terbatas dalam pemenuhan sumber daya manusia yang akan menjadi diplomat.

Masalah lainnya terkait dengan ekonomi ialah Timor Leste termasuk ke dalam daftar salah satu negara termiskin di Asia dengan sekitar setengah dari 1,1 juta warga negaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, Timor Leste selalu menerima bantuan dari negara donor untuk membantu perkembangan perekonomian negaranya. Ketergantungan negara tersebut terhadap negara pendonor semakin menyulitkan langkah Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN karena hal tersebut menjadi pembuktian bahwa Timor Leste belum mampu secara ekonomi untuk bergabung dengan ASEAN. Laporan *Non-Governmental Organizations* (NGOs) dan media mencatat bahwa antara tahun 1999-2009 Timor Leste menerima bantuan dana sekitar USD 5,2 – 8,8 milyar.<sup>4</sup>

### **I. Kerangka Teori**

Menurut kebijakan luar negeri yang di ambil oleh Timor Leste, dalam penelitian ini, penulis menggunakan prespektif neo-realis atau realisme struktural. Neo-realis memfokuskan pada struktur sistem internasional yang mempengaruhi interaksi dan kebijakan antar negara. Struktur memaksa negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk *survive*. Asumsi dalam neo-realis, pertama struktur sistem internasional bersifat anarkis. Anarki

<sup>3</sup> Alkatiri, Ibnu Masshud. 2012. "*Hambatan Timor Leste Mendapatkan Status Keanggotaan Penuh ASEAN*". Yogyakarta : Universitas Pembangunan Nasional.(hlm:1)

<sup>4</sup> Ibid, 27

berlaku karena dalam hubungan internasional tidak ada otoritas kedaulatan yang bisa memaksakan aturan hukum serta menjamin yang bersalah dihukum.<sup>5</sup>Tidak ada negara yang lebih superior atas negara lain, karena setiap negara merdeka memiliki kedaulatan masing-masing.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisis negara bangsa (*nation-state level of analysis*). Fokus tingkat analisis negara bangsa adalah pada pemerintah, lembaga-lembaga pembuat keputusan, serta kelompok-kelompok yang mempengaruhi formulasi kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>6</sup> Negara memiliki peran yang besar serta memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Diplomasi Bilateral dan Diplomasi Multilateral. Yang mana Diplomasi Bilateral merupakan diplomasi yang dilakukan oleh dua negara dalam hubungan internasional secara tertutup atau rahasia.<sup>7</sup> diplomasi bilateral ialah hubungan antara dua pihak dimana mereka saling bertemu untuk membicarakan suatu hal dengan tujuan melakukan kerjasama, penempatan duta besar, mengadakan perjanjian atau hanya sekedar melakukan kunjungan kenegaraan.

Sementara itu Diplomasi Multilateral adalah diplomasi yang cakupannya luas dan dilaksanakan oleh banyak pihak. Diplomasi ini juga dilaksanakan dengan cara terbuka melalui negosiasi agar negara mendapatkan kepercayaan tidak hanya dalam negaranya akan tetapi juga pada lingkungan internasional.

---

<sup>5</sup> Jill Steans dan Lyold Pettiford. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 46.

<sup>6</sup> Richard W. Mansbach. *Pengantar Politik Global*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 13

<sup>7</sup> Evans, Graham dan Jeffrey Newham, *Dictionary of International Relation*, (London : Penguin reference.1997)

Timor Leste dalam upayanya untuk bergabung dalam keanggotaan tetap ASEAN melakukan berbagai diplomasi, yakni diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Yang mana Timor Leste melakukan kerja sama dan menjalin hubungan baik terhadap negara-negara di ASEAN.

## II. Pembahasan

Timor Leste atau Timor Timur (sebelum merdeka) yang bernama resmi Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Terletak di sebelah utara Australia dan di bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.

Pada tahun 1975, Timor Leste memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi Indonesia menjadikan wilayah Timor Leste ini sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Timor Timur menjadi negara berdaulat pertama pada abad ke-21 yaitu pada tanggal 20 Mei 2002.<sup>8</sup>

Ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi negara mereka. Timor Leste menjadi salah satu dari dua negara yang didominasi oleh umat Katolik Roma di Asia Timur setelah Filipina.

### Tujuan dan Prinsip Organisasi ASEAN

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan sebutan *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari

---

<sup>8</sup> Dhiyaulhaq, *RPULplus sd*, (Jakarta: PT.Wahyumedial.2015) hlm.247

negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Adapun tujuan dari ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan melalui usaha dan semangat bersama untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat;

6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;

7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Sedangkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematickan
6. Kerjasama efektif antara anggota

#### **Keanggotaan ASEAN**

ASEAN merupakan organisasi regional (kawasan) yang dibentuk oleh pemerintahan lima Negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok oleh kelima menteri luar negeri masing-masing Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ibukota Thailand, tanggal itu juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN, dengan perwakilan masing-masing negara pendiri:<sup>9</sup>

1. Adam Malik dari Indonesia

<sup>9</sup> Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta, 1992, hal.1

2. Tun Abdul Razak dari Malaysia
3. S. Rajaratnam dari Singapura
4. Thanat Koman dari Thailand
5. Narcisco Ramos dari Filipina

Deklarasi Bangkok menghasilkan maksud dan tujuan terbentuknya ASEAN. Selain itu, disepakati pula tentang struktur organisasi ASEAN dalam rangka mencapai tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Sidang tahunan para menteri luar negeri.
2. Standing committee, komite yang bersidang di antara dua Menlu ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Komite ini beranggotakan para duta besar negara anggota.
3. Komite tetap dan komite ad hoc (khusus), biasanya terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan pejabat resmi mengenai masalah-masalah yang khusus.
4. Sekretariat nasional (Seknas) di masing-masing negara anggota ASEAN

Struktur ASEAN Berdasarkan KTT Kuala Lumpur 1977. Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur bulan Agustus 1977, peserta KTT menyepakati dan mengesahkan struktur organisasi ASEAN yang baru, yaitu :

1. Pertemuan Kepala Pemerintahan yang merupakan otoritas tertinggi ASEAN
2. Sidang tahunan para Menlu
3. Sidang para menteri ekonomi setiap 2 tahun sekali
4. Sidang para menteri sektoral
5. Standing committee
6. Komite-komite

Dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ASEAN tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Asia Tenggara sebelumnya, terutama dalam hubungan dua kerjasama, ASA dan

Maphilindo. Oleh sebab itu untuk dapat mengetahui latar belakang ASEAN, perlu kiranya untuk mengetahui pengalaman MAPHILINDO dan ASA.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kerjasama regional pertama di Asia Tenggara yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri tanpa ikut sertanya negara lain di luar kawasan adalah Maphilindo dan ASA. Walaupun kedua kerjasama regional ini masing-masing dibentuk atas dasar kepentingan negara yang hendak membentuknya. ASA (*Association Of South East Asia*) misalnya, dibentuk pada tahun 1961 yang dengan tujuan untuk membendung pengaruh komunis dari Uni Soviet.<sup>10</sup>

Kemudian tidak ketinggalan dengan Maphilindo, organisasi yang dibentuk sebenarnya untuk mencegah lahirnya Negara imperialis Malaysia. Walaupun kedua kerjasama tersebut dibentuk, tapi sayang umurnya tidak bertahan lama. Organisasi ASA hanya dapat bertahan selama enam tahun mulai dibentuk pada tahun 1961 dan resmi dibubarkan pada tahun 1966, karena sengketa Sabah yang dituntut Filipina terhadap Malaysia. Tidak begitu halnya dengan Maphilindo, bahkan umurnya lebih pendek lagi, organisasi ini hanya berusia dua minggu lebih.

Pada mulanya ketika pemikiran untuk melanjutkan kerjasama regional di Asia Tenggara mulai timbul terutama pada saat-saat mulai berakhirnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, pihak Malaysia menginginkan ASA dapat dipertahankan dan jika perlu memperluas keanggotaannya. Sebaliknya, Indonesia menyodorkan Maphilindo untuk dijadikan dasar kerjasama regional yang akan datang.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm 41

<sup>11</sup> M. Sabir, ASEAN Harapan dan Kenyataan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal.30

Selain itu dalam menelusuri terbentuknya ASEAN, dianggap perlu pula untuk mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asia Tenggara sekitar tahun 1965-1966. Peristiwa itu yang berkaitan erat dengan pembentukan ASEAN. Mungkin yang paling erat kaitannya adalah munculnya Orde Baru di Indonesia menggantikan Orde Lama. Dalam tampilnya Orde Baru, konfrontasi terhadap Malaysia diakhiri, dan dengan demikian hubungan Indonesia dengan Malaysia yang berantakan sejak lahirnya Malaysia tahun 1963 kembali normal.

Pada waktu yang bersamaan terjadi pula peristiwa lain dalam bentuk pertukaran pemimpin di Filipina dari Presiden Macapagal kepada Presiden Marcos. Pada masa Macapagal, hubungan Filipina dengan Malaysia menjadi tegang akibat sengketa Sabah.<sup>12</sup> Masalah itu sempat membekukan hubungan kedua Negara. Sebagai presiden terpilih yang baru, Marcos melunakkan sikap Filipina terhadap Sabah. Hal itu dengan sendirinya ikut memperbaiki dan memulihkan hubungan Filipina-Malaysia.

Peristiwa itu disusul pula dengan keluarnya Singapura dari federasi Malaysia. Hal itu memberi suasana baru di kawasan Asia Tenggara yang sedang dilanda oleh kemelut konfrontasi. Sebelumnya, sewaktu Singapura masih bergabung dengan Malaysia, ada perbedaan dalam mengelola kebijaksanaan ekonomi yang akhirnya menjadi pendorong bagi Singapura untuk keluar dari federasi itu. Tanpa pulihnya kembali hubungan Singapura-Malaysia, kedudukannya malah akan terjepit antara dua Negara Melayu-Malaysia dan Indonesia.

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang mencakup kesadaran akan perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina

kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan sebutan *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November.

Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah :<sup>13</sup>

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara Negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 41

<sup>13</sup> Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta, 1992, hal.1

bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;

4. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;
5. Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional. Perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;
6. Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;

Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan ASEAN seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Disusunlah suatu struktur organisasi ASEAN yang pada saat ini telah mengalami pengembangan dengan ketentuan deklarasi ASEAN yang merupakan dasar pembentukan ASEAN tersebut

### **Alasan Timor Leste Belum di Terima Sebagai Anggota ASEAN**

Jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan United Nations Mission in East Timor (UNAMET) telah menghantarkan wilayah Timor Leste memasuki babakan sejarah baru. Setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh UNTAET (United Nation Transition in East Timor) kepada pemerintah baru Timor Leste pada 20 Mei 2002, rakyat Timor Leste menyelenggarakan pemerintahan sebagai

negara yang merdeka. Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara berdaulat, dengan sebutan resmi Republica Democratica de Timor Leste (RDTL).

Sebagai sebuah negara yang baru, tentunya Timor Leste membutuhkan kerjasama dengan negara lain khususnya dengan negara-negara tetangganya untuk memajukan pembangunan dalam negeri dan memenuhi kepentingan nasional Timor Leste. Dalam sejarah negara bangsa, tidak dipungkiri bahwa RDTL sebagai sebuah negara baru menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang hampir tidak dapat dihindarkan dalam masa transisinya.

Menyadari keterbatasan yang dihadapi dengan berbagai permasalahan internal yang menimpa Timor Leste dan ada ketakutan dari pihak Timor Leste terhadap intervensi asing yang mengancam mereka sebagai negara yang berdaulat, Timor Leste berupaya untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi negerinya yang kecil dari negara-negara besar di sekelilingnya, termasuk Australia.

Timor leste menyadari akan kemampuan dan kualitas bangsanya yang masih sangat terbatas, tentunya Timor Leste menyadari pentingnya mengambil bagian dalam organisasi regional bersama ASEAN. Terkait keinginan Timor Leste bergabung dengan ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan tidak ada penolakan dari negara-negara anggota ASEAN. Hanya saja, belum ada kecocokan waktu dan kesiapan dari kedua belah pihak. Namun, di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Gerakan Nonblok di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan bahwa, mayoritas negara anggota ASEAN sudah menyetujui bergabungnya Timor Leste menjadi anggota

ke-11 perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara tersebut.

Namun, masih ada satu negara anggota ASEAN yang keberatan, tanpa bersedia menyebutkan nama negara tersebut. Berdasarkan pemaparan singkat diatas dan upaya diplomasi pemerintah Timor Leste untuk bergabung dalam keanggotaan ASEAN, tentu saja bukanlah hal mudah. Sementara itu, berdasarkan Piagam ASEAN pasal 6, ayat 3, menyatakan Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus diantara negara anggota oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.

Kondisi ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi Timor Leste, terkait keinginannya untuk mendapatkan status keanggotaan penuh ASEAN. Meskipun Timor Leste telah menunjukkan usahanya melalui beberapa proses agar dapat tercatat sebagai negara anggota ASEAN, tidak berarti bahwa pengakuannya secara instan dapat disetujui oleh ASEAN.

Hal ini berkaitan dengan masalah politik dan keamanan serta persoalan ekonomi dan sumber daya manusia Timor Leste yang menjadi pertanyaan bagi negara anggota ASEAN terhadap kesiapan untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas di saat bergabung dengan ASEAN. Mencermati dinamika politik keamanan di Timor leste saat ini yang dikategorikan masih muda dan rapuh dalam lembaga-lembaga pemerintahan serta sangat rentan terhadap konflik, dikhawatirkan akan berpotensi menghambat upaya dan target perwujudan Komunitas ASEAN 2015, khususnya pada pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian negara-negara di kawasan dan perdamaian di dunia secara luas dalam lingkungan yang demokratis, adil dan harmonis, tentunya

menjadi pertimbangan serius bagi negara anggota ASEAN untuk menerima keanggotaan Timor Leste saat ini.

Salah satu persoalan yang menghambat konsensus ASEAN untuk keanggotaan penuh Timor Leste adalah permasalahan ekonomi atau keterbatasan finansial dan sumber daya manusianya. Ketika disetujui sebagai anggota baru ASEAN, Timor Leste tidak hanya mengadopsi norma dasar, tujuan dan kebijakan ASEAN, melainkan Timor Leste memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan-aturannya. Negara anggota ASEAN (Singapura), dalam beberapa kesempatan menyatakan keberatan tentang kesiapan Timor Leste dalam mengimplementasikan tanggung jawab, khususnya terkait pada sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pertimbangan bahwa setiap tahunnya organisasi ASEAN melakukan pertemuan tidak kurang dari 620 pertemuan tingkat hubungan luar negeri, agrikultur, dan pertukaran budaya. Menghadiri 620 pertemuan ASEAN per tahun, tentunya akan membutuhkan pengeluaran keuangan yang besar bagi negara yang masih berjuang membenahi kerusakan dan menetapkan infrastruktur dasar. Sebagai anggota ASEAN, Timor Leste juga akan diharapkan untuk menjadi tuan rumah beberapa pertemuan yang bergantung pada kepentingan mereka, yang mana memerlukan biaya jutaan dollar untuk membenahi fasilitas konferensi. Selain itu, kondisi ini tidak hanya sebatas pemenuhan keuangan semata, namun juga menekankan pada sumber daya manusia yang sangat terbatas.

Kementerian Luar Negeri saat ini mempekerjakan setidaknya 85 orang, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dan jumlah ini hanya 55 orang diplomat. Nampaknya terdapat kewajiban moral bagi Indonesia untuk mendukung Timor Leste

yang merupakan bekas negara kolonialnya sebagai kompensasi untuk perlakuan tragis yang dituding sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang terjadi sebelum dan selama masa krisis di tahun 1999. Selain itu, Timor Leste juga mendapatkan dukungan dari negara anggota ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Kamboja.

Akan tetapi, pandangan bertolak belakang diperlihatkan negara anggota ASEAN, khususnya Singapura. Singapura beranggapan bahwa Timor Leste belum siap menyerap tantangan dan kompleksitas di lingkungan ASEAN, terlebih upaya ASEAN mencanangkan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Singapura berpandangan bahwa masuknya Timor Leste di ASEAN saat ini dapat menggagalkan implementasi Komunitas ASEAN, khususnya ASEAN Economic Community (AEC). Melihat keterbatasan ekonomi dan finansial serta sumber daya manusia di atas, tantangan yang dihadapi Timor Leste apabila menjadi anggota penuh di ASEAN, tidak saja mematuhi finansial hukum dan implementasi prinsip dasar dan tujuan ASEAN.

### **Upaya Timor Leste Menjadi Anggota Tetap Asean**

Sejak Timor Leste mendapatkan pengakuan dari dunia internasional terhadap kemerdekaannya, secara langsung menempatkan posisinya untuk terlibat dan mengambil bagian dalam komunitas ASEAN. Langkah awal yang ditempuh yaitu dengan berpartisipasi dalam rapat dengan negara-negara yang bernaung dalam wadah ASEAN sebagai pengamat.

Setelah mendapatkan status pengamat dalam ASEAN pada tahun 2002, Timor Leste telah mempercepat usahanya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampuh untuk mengisi pada pos-pos yang di perlukan untuk berpartisipasi dalam organisasi ASEAN.

Tahun 2005 Timor Leste telah bergabung dengan ASEAN Regional Forum (ARF) dan pada tahun 2007 menandatangani Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Langkah ini menunjukkan makna bagi kepentingan Timor Leste bergabung dengan ASEAN.<sup>14</sup> Timor Leste memiliki hubungan diplomasi dengan 10 negara ASEAN.

Kini Timor Leste telah membuka kantor perwakilan di Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok. Kedutaan besar Timor Leste di Bangkok juga menangani hubungan dengan Kamboja dan Laos, sedangkan di Kuala Lumpur juga menangani hubungan dengan Myanmar dan Vietnam.

Selanjutnya, dengan membentuk hubungan diplomatis di 10 negara-negara anggota ASEAN dan membuka Sekretaris ASEAN nasional di ibu kota negara, Dili, di tahun 2009. Timor Leste juga menghadiri sejumlah pertemuan ASEAN untuk melengkapi kesiapan dan membangun kapasitasnya.<sup>15</sup> Usaha seriusnya dalam memasukikancah keanggotaan ASEAN ditandai saat Timor Leste akhirnya mengajukan permohonannya secara formal pada 04 Maret 2011. Hal ini mengindikasikan adanya pengakuan kedaulatan dan komitmen akan keinginan Timor Leste untuk bekerjasama dengan ASEAN.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pemaparan yang telah dijabarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan situasi paska Perang Dingin telah memperluas spektrum pilihan kebijakan baru bagi ASEAN menuju suatu Asia Tenggara yang lebih solid dan independen.

ASEAN sebagai suatu entitas organisasi regional di kawasan Asia Tenggara secara kolektif telah mencapai kemajuan yang signifikan melalui beberapa

<sup>14</sup> [Hhttp://English.peopledaily.com](http://English.peopledaily.com) diakses pada maret 2016

<sup>15</sup> Ibid

kerjasamanya di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya yang berkembang dan bertransformasi menjadi salah satu organisasi regional yang paling berhasil di dunia.

Bagi Timor Leste, ASEAN mempunyai makna penting dan menjadi potensi strategis dalam kerjasama regional. Keinginan Timor Leste untuk bergabung bersama ASEAN mengindikasikan bahwa posisi ASEAN semakin solid dalam memainkan kiprahnya melalui kerjasama regional.

Dengan menjadi bagian dari anggota ASEAN, tentunya Timor Leste akan mendapatkan kesempatan yang luas bagi 36 kontribusinya terhadap perdamaian baik regional maupun dunia serta berpeluang dalam pergaulan internasionalnya. Asumsinya bahwa sebagai sebuah negara baru dan menyadari akan keterbatasan yang ada, penting bagi Timor Leste untuk mengambil bagian dalam organisasi regional ASEAN.

Namun, negara anggota ASEAN sejauh ini menunjukkan perbedaan pandangannya terkait konsensusnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik kesimpulan terkait hambatan Timor Leste mendapatkan status keanggotaan penuh ASEAN didasarkan pada permasalahan politik keamanan dan persoalan ekonomi dan sumber daya manusia Timor Leste.

Terkait permasalahan politik keamanan, negara baru Timor Leste dianggap sangat rentan terhadap konflik dan aksi kekerasan akibat pertentangan elit politik nasional. Sejarah mencatat bahwa sejak kemerdekaannya pada tahun 2002, eskalasi konflik di Timor Leste terus meningkat sampai pada penyerangan terhadap pemimpin nasional Timor Leste yaitu Perdana Menteri, Xanana Gusmao dan penembakan terhadap Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta pada insiden 11 Februari 2008.

Selain itu, Timor Leste juga masih menghadapi persoalan ekonomi dan sumber daya manusianya. Pemikiran ini didasarkan pada pembangunan ekonomi Timor Leste yang tergolong rendah dan kesiapan sumber daya manusia yang saat ini masih terbatas, sehingga dianggap dapat menghambat pencahangan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Hal ini merupakan salah satu perhatian dan pertimbangan bagi negara anggota ASEAN untuk memberikan pengakuannya (konsensus) terkait keinginan Timor Leste bergabung dengan ASEAN.

Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan sisi geografis, strategis maupun ekonomi, keanggotaan Timor Leste di ASEAN merupakan salah satu bagian penting di kawasan Asia Tenggara. Upaya perdagangannya dengan anggota ASEAN tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi Timor Leste semata, melainkan juga akan berkontribusi bagi ASEAN.

Instabilitas politik keamanan dan ekonomi di Timor Leste akan berdampak secara negatif terhadap tujuan yang dicanangkan ASEAN, yaitu perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, hanya masalah waktu negara anggota ASEAN akan memberikan pengakuannya terhadap keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Persoalan politik keamanan domestik, perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia, kelak tidak menjadi hambatan yang merintangi konsensusnya.

**Referensi:**

Alkatiri, Ibnu Masshud. 2012. *“Hambatan Timor Leste Mendapatkan Status Keanggotaan Penuh ASEAN”*. Yogyakarta : Universitas Pembangunan Nasional.(hlm:1)

Dhiyaulhaq, *RPULplus* sd,(Jakarta: PT.Wahyumedial.2015) hlm.247

Evans, Graham dan Jeffrey Newham,  
*Dictionary of International Relation*,  
(London : Penguin reference.1997)

Jill Steans dan Lyold Pettiford.  
*Hubungan Internasional: Perspektif dan  
Tema*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).  
Hal. 46

M. Sabir, ASEAN Harapan dan  
Kenyataan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,  
1992, hal.30

Richard W. Mansbach. *Pengantar  
Politik Global*, (Bandung: Nusa  
Media,2012), hal. 13

Sekretariat Nasional ASEAN  
Departemen Luar Negeri Republik  
Indonesia, ASEAN Selayang Pandang,  
Jakarta, 1992, hal.1